



RENCANA KERJA TAHUN 2022

Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

PEMERINTAH KOTA SERANG

Jl. A. Yani No.30 Cipare Serang-Banten
Telp. (0254) 7911481 Fax. (0254) 7911481

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT meridhoi kita sekalian, aamiin.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga apa yang direncanakan dalam upaya terwujudnya aparatur berwibawa, simpatik dan akuntabel menuju Kota Serang madani dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Mei 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG**



KUSNA RAMDANI, S.Sos, M.Si
NIP. 19711204 199202 1 001

RENCANA KERJA TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.5
1.4 Sistematika Penulisan	I.6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALI	II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II.24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II.32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	II.42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III.9
3.3 Program dan Kegiatan	III.10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV.1
4.1 Rencana Program Mendesak	III.1
BAB V PENUTUP	V.1
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2022	V.1
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....	V.1
5.3 Rencana Tindak Lanjut	V.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	II.5
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.22
Tabel 2.3	Tabel Analisi SWOT	II.30
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Serang	II.32
Tabel 2.5	Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	II.43
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	III.5
Tabel 3.2	Capaian Kinerja SPM	III.8
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	III.5
Tabel 3.4	Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renja PD Tahun 2022	III.25
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kegiatan Pada Program Mendesak Tahun 2022	IV.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintah Wajib.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang merupakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kota Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Serang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai pelaksana penegakkan Perundang-undangan daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan kebakaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten/Kota diharuskan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengimplementasikan apa yang telah digariskan dalam RKPD dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja pelayanan terhadap masyarakat dari tahun sebelumnya sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang disusun berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2018-2023.

1.1. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Kota Serang tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

20. Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 74);

1.2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

- 1) Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022;
- 2) Menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka penegakkan Perundang-undangan daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan kebakaran.;
- 3) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan perangkat daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang telah disusun sebelumnya yang akan dilaksanakan melalui kegiatan;
- 2) Menciptakan sinergitas Perencanaan secara berkesinambungan antara berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;

- 3) Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini terdiri dari : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Dearah mengacu pada laporan kinerja tahunan Perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rencana awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah dan Program Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari : Rencana Program Mendesak

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Satpol PP Kota Serang Tahun 2020 telah melaksanakan 7 (tujuh) program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 3 (tiga) program yang sifatnya non urusan atau *supporting* terhadap program utama atau urusan wajib yang berjumlah 4 (empat) Program. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Memperoleh alokasi anggaran Sebesar Rp. 13.438.204.229,11- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Sembilan Koma Sebelas Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. Rp. 3.445.894.229,11.- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan koma sebelas Rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 3.273.607.939,00.- atau dengan tingkat capaian target sebesar 95 % dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 9.992.310.000,00.- yang bersumber dari pengalokasian APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2020 dengan realiasi sebesar Rp. 9.370.536.561,00.- sehingga tingkat capaian target sebesar 93.78 %. Adapun Rincian realiasi anggaran program dan kegiatan Satpol PP Kota Serang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR:

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,873,663,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,724,250,800.00,- atau tingkat capaian sebesar 92.03 %. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran : Alokasi anggaran Rp. 261,156,000.00, Realisasi sebesar Rp. 251,261,700.00, tingkat capaian sebesar 96.21 %
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor : Alokasi anggaran Rp. 315,925,000.00, Realisasi sebesar Rp. 303,630,000.00, tingkat capaian sebesar 96.11%
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor : Alokasi anggaran Rp. 692,374,000.00, Realisasi sebesar Rp. 610,043,400.00, tingkat capaian sebesar 88.11%
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur : Alokasi anggaran Rp. 234,650,000.00, Realisasi sebesar Rp. 231,125,000.00, tingkat capaian sebesar 98.50 %
- 5) Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD : Alokasi anggaran Rp. 124,240,000.00, Realisasi sebesar Rp. 85,630,000.00, tingkat capaian sebesar 68.92 %
- 6) Pengelolaan Barang Milik Daerah : Alokasi anggaran Rp. 35,400,000.00, Realisasi sebesar Rp. 35,400,000.00, tingkat capaian sebesar 100 %
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman : Alokasi anggaran Rp. 41,932,000.00, Realisasi sebesar Rp. 41,449,400.00, tingkat capaian sebesar 98.85 %
- 8) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah : Alokasi anggaran Rp. 167,986,000.00, Realisasi sebesar Rp. 165,711,300.00, tingkat capaian sebesar 98.65 %

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN:

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,784,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 23,462,000.00 atau tingkat capaian sebesar 98.65 %. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran : Alokasi anggaran Rp. 23,784,000.00, Realisasi sebesar Rp. 23,462,000.00, tingkat capaian sebesar 98.65%

3. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA:

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 163,482,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 162,378,700.00 atau tingkat capaian sebesar 99.33%. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Alokasi anggaran Rp. 48,832,000.00, Realisasi sebesar Rp. 47,992,000.00, tingkat capaian sebesar 98.28 %
- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah : Alokasi anggaran Rp. 40,222,000.00, Realisasi sebesar Rp. 40,222,000.00, tingkat capaian sebesar 100 %
- 3) Pengendalian dan Evaluasi Kinerja : Alokasi anggaran Rp. 17,176,000.00, Realisasi sebesar Rp. 17,092,000.00, tingkat capaian sebesar 99.51%
- 4) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah : Alokasi anggaran Rp. 57,252,000.00, Realisasi sebesar Rp. 57,072,700.00, tingkat capaian sebesar 99.69%

4. PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,081,865,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 4,834,294,708.00 atau tingkat capaian sebesar 95.13 %. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Pengendalian dan Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Alokasi anggaran Rp. 244,635,000.00, Realisasi sebesar Rp. 241,935,000.00, tingkat capaian sebesar 98.90%
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Alokasi anggaran Rp. 19,505,000.00, Realisasi sebesar Rp. 19,432,900.00, tingkat capaian sebesar 99.63%
- 3) Penyiapan tenaga pengendali ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat : Alokasi anggaran Rp. 4,817,725,000.00, Realisasi sebesar Rp. 4,572,926,808.00, tingkat capaian sebesar 94.92%

5. PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH:

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143,695,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 129,970,000.00 atau tingkat capaian sebesar 90.45 %. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis : Alokasi anggaran Rp. 11,000,000.00, Realisasi sebesar Rp. 10,440,000.00, tingkat capaian sebesar 94.91%
- 2) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Masyarakat : Alokasi anggaran Rp. 19,000,000.00, Realisasi sebesar Rp. 18,460,000.00, tingkat capaian sebesar 97.16%
- 3) Pemberdayaan PPNS dan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada : Alokasi anggaran Rp. 113,695,000.00, Realisasi sebesar Rp. 101,070,000.00, tingkat capaian sebesar 88.90%

6. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN:

Pada program ini terdapat 2 (Dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,446,174,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,260,883,353.00 atau tingkat capaian sebesar 92.43%. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran : Alokasi anggaran Rp. 1,966,674,000.00, Realisasi sebesar Rp. 1,885,233,353.00, tingkat capaian sebesar 95.86%
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran : Alokasi anggaran Rp. 479,500,000.00, Realisasi sebesar Rp. 375,650,000.00, tingkat capaian sebesar 78.34%

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN POTENSI APARATUR :

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259,647,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 235,297,000.00 atau tingkat capaian sebesar 90.62%. Adapun target dan realisasi kegiatannya yaitu :

- 1) Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur: Alokasi anggaran Rp. 259,647,000.00, Realisasi sebesar Rp. 235,297,000.00, tingkat capaian sebesar 90.62%

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Belanja OPD

Satpol PP Kota Serang dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2020 perlu dilakukan evaluasi atau review, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan, solusi, serta pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagai bahan masukan untuk perencanaan ditahun berikutnya. Evaluasi ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendeah

Adapun hasil evaluasi kriteria penilaian realisasi kinerja pada program dan kegiatan satpol PP Tahun 2020 dengan menggunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR:

Program ini memiliki tingkat capaian sebesar 92.03% sehingga program ini memiliki kriteria penilaian Realisasi kinerja dengan katagori **Sangat Tinggi**. Program ini terdapat kegiatan- kegiatan dengan tingkat realisasi kinerjanya kurang dari 90 % diantaranya :

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan capaian sebesar 88.11% sehingga memiliki kriteria penilaian dengan katagori **tinggi**. Adapun permasalahan dan solusinya :

- Permasalahan :

- 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas untuk kendaraan Operasional menggunakan anggaran BTT Selama Masa PSBB Covid – 19 dengan Waktu yang tidak dapat ditentukan
- 2) Penggunaan biaya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk Kendaraan Operasional Damkar lebih sedikit dari Jumlah Anggaran yang

dianggarkan sehingga kelebihan anggaran atau terjadi sisa anggaran

- Solusi :

- 1) Kebutuhan Wajib Mengikat sebaiknya hanya dianggarkan Pada APBD yang tertuang dalam DPA
- 2) Penganggaran untuk biaya STNK harus lebih diakuratkan

b. Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD sebesar 68.92 % sehingga memiliki kriteria penilaian dengan katagori **sedang**. Adapun permasalahan dan solusinya:

- Permasalahan : belanja dekorasi tidak dapat terealisasi karena acara/kegiatan tidak dapat diselenggarakan akibat Covid-19
- Solusi : Jangan Menganggarkan belanja yang berkaitan dengan Acara yang tidak dapat dilakukan di Masa Covid-19

2. PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH:

Program ini memiliki tingkat capaian sebesar 90.45 % sehingga program ini memiliki kriteria penilaian Realisasi kinerja dengan katagori **Tinggi**. Akan tetapi pada Program ini terdapat kegiatan dengan tingkat realisasi kinerjanya kurang dari 90 % yaitu :

a. Pemberdayaan PPNS dan Penanganan Kasus Pelanggaran

Perda dan Perkada sebesar 88.90% sehingga memiliki kriteria penilaian dengan katagori **tinggi**. Adapun permasalahan dan solusinya :

- Permasalahan : Tidak Terlaksananya Pelaksanaan Sidang Tipiring yang melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan
- Solusi : Pelaksanaan Sidang Tipiring dianggarkan sesuai urgensinya dan pelaksanaan disesuaikan dengan masa pandemi covid-19

3. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN :

Program ini memiliki tingkat capaian sebesar 92.43% sehingga program ini memiliki kriteria penilaian Realisasi kinerja dengan katagori **Sangat Tinggi**. Akan tetapi pada Program ini terdapat kegiatan dengan tingkat realisasi kinerjanya kurang dari 90 % yaitu:

a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sebesar 78.34% sehingga memiliki kriteria penilaian dengan katagori **Tinggi**. Adapun permasalahan dan solusinya :

- Permasalahan : Tidak Terealisasinya Belanja paket/pengiriman Kendaraan Hibah Damkar dari Korea Selatan kerana keterlambatan akibat Covid – 19 dan Badai Lalina yang Melanda Perairan Korea Selatan
- Solusi : Penyediaan Anggaran ulang pada APBD TA.2021 untuk Belanja paket/pengiriman Kendaraan Hibah Damkar

Adapun permasalahan dan solusi Pengelolaan Belanja Satpol PP Kota Serang Tahun 2021 dalam format tabel sebagaimana terlampir *Tabel Lampiran 2*.

Berikut tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun berjalan (2021)				
			K	(Rp)	K	(Rp)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		K	(Rp)	Realisasi Capaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)		Realisasi Tingkat Capaian realisasi target renstra s/d tahun berjalan (2021) (%)		
							K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			K	(Rp)	K	(Rp)	K
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6x100)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4*100)			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			89,965,546,099.11	13,091,988,511.00	13,438,204,229.11	12,644,144,500.00		94.09		12,396,951,306.00		38,133,084,317.00		42.39				
1 05 01	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	%	90	36,323,560,832.11	75	5,990,909,711.00	75	5,506,823,229.11	75	5,183,699,439.00	75	94.13	80	5,318,906,756.00	80	16,493,515,906.00	88.89	45.41
1 05 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	82	1,259,747,364.00	17	292,540,700.00	14	163,482,000.00	14	162,378,700.00	14	99.33	15	168,685,000.00	46	623,604,400.00	56.10	49.50
1 05 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja (P.Renstra, Renja dan P.Renja)	Dok	13	429,493,000.00	3	95,661,000.00	2	48,832,000.00	2	47,992,000.00	2	98.28	3	74,780,000.00	8	218,433,000.00	61.54	50.86
1 05 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dok	5	146,352,205.00	1	31,419,000.00	1	14,555,500.00	1	14,555,500.00	1	100.00	1	28,915,000.00	3	74,889,500.00	60.00	51.17
1 05 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	5	102,352,044.00	1	31,419,000.00	1	14,555,500.00	1	14,555,500.00	1	100.00	1	7,500,000.00	3	53,474,500.00	60.00	52.25
1 05 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dok	5	32,324,107.00	1	9,922,000.00	1	5,555,500.00	1	5,555,500.00	1	100.00	1	4,575,000.00	3	20,052,500.00	60.00	62.04
1 05 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	5	32,324,107.00	1	9,922,000.00	1	5,555,500.00	1	5,555,500.00	1	100.00	1	4,575,000.00	3	20,052,500.00	60.00	62.04

1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (LPPD, LKPJ, LAKIP, TAPKIN)	Dok	20		4		4		4		4		4		12		60.00	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Semesteran (Evlap Renja, SIPD, SAKIP, SPM)	Dok	20	331,065,048.00	4	78,464,700.00	4	57,252,000.00	4	57,072,700.00	4	99.69	4	48,340,000.00	12	183,877,400.00	60.00	55.54
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data dan profil OPD	Dok	9	185,836,853.00	2	35,733,000.00	0	17,176,000.00	0	17,092,000.00	0	99.51	0	-	2	52,825,000.00	22.22	28.43
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	30	20,267,777,266.11	6	3,760,916,711.00	3	3,469,678,229.11	3	3,297,069,939.00	2	95.03	6	3,923,481,468.00	15	10,981,468,118.00	50.00	54.18
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Dok	5	19,918,813,316.11	1	3,735,109,711.00	1	3,445,894,229.11	1	3,273,607,939.00		95.00	1	3,853,036,468.00	3	10,861,754,118.00	60.00	54.53
1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun (CaLk)	Dok	5	46,444,650.00	1	6,226,000.00	-	0	-	0	#DIV/0!	1	9,995,000.00	2	16,221,000.00	40.00	34.93	
1	05	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca, LPE, LO, LRA)	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan (Neraca, LPE, LO, LRA)	Dok	20	302,519,300.00	4	19,581,000.00	2	23,784,000.00	2	23,462,000.00	2	98.65	4	60,450,000.00	10	103,493,000.00	50.00	34.21
1	05	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD	Dok	35	220,335,692.00	7	22,040,000.00	7	35,400,000.00	7	35,400,000.00	7	100.00	7	47,850,000.00	21	105,290,000.00	60.00	47.79
1	05	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBU dan RKPBU	Dok	10	41,306,292.00	2	6,612,000.00	2	7,420,000.00	2	7,420,000.00	2	100.00	2	5,910,000.00	6	19,942,000.00	60.00	48.28
1	05	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Drf. Penghapusan, Penerimaan-Pengeluaran (stock opname), KIB dan KIR, Sipbarjas/Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Dok	25	179,029,400.00	5	15,428,000.00	5	27,980,000.00	5	27,980,000.00	5	100.00	5	41,940,000.00	15	85,348,000.00	60.00	47.67
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penujang Administrasi Kepegawaian PD	%	100	1,827,420,000.00	80	179,400,000.00	80	234,650,000.00	80	231,125,000.00	80	98.50	100	36,000,000.00	100	446,525,000.00	100.00	24.43
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan Pakaian Hari-hari Tertentu Beserta Perlengkapannya	Stel	153 8	1,509,660,000.00	11 7	179,400,000.00	25 1	234,650,000.00	251	231,125,000.00	251	98.50	80	36,000,000.00	448	446,525,000.00	29.13	29.58
1	05	01	2	05	10	Sosialisasi peraturan perundang-Undangan	jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Oran g	180	317,760,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0	-	0.00	-

1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD	%	100	2,668,584,610.00	100	573,222,500.00	100	422,551,000.00	100	412,448,700.00	100	97.61	100	418,764,536.00	100	1,404,435,736.00	100.00	52.63
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	250	265,940,780.00	50	46,062,000.00	50	41,675,000.00	50	38,940,000.00	50	93.44	33	38,449,791.00	133	123,451,791.00	53.20	46.42
							Jumlah Perkakas, Alat, dan Bahan Kantor	Jenis	222	223,447,430.00	67	53,699,000.00	26	17,017,000.00	26	16,767,000.00	26	98.53	28	29,343,772.00	121	99,809,772.00	54.50	44.67
1	05	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jenis	74	13,207,090.00	23	2,486,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	5	1,891,258.00	28	4,377,258.00	37.84	33.14
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	60	238,954,500.00	12	38,970,000.00	12	41,932,000.00	12	41,449,400.00	12	98.85	12	32,940,000.00	36	113,359,400.00	60.00	47.44
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	285,840,710.00	12	36,125,000.00	12	49,621,000.00	12	49,621,000.00	12	100.00	12	33,311,242.00	36	119,057,242.00	60.00	41.65
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku perundang-undangan	Bulan	60	263,616,600.00	12	49,217,000.00	12	78,160,000.00	12	77,160,000.00	12	98.72	12	59,509,473.00	36	185,886,473.00	60.00	70.51
1	05	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	48	33,100,000.00	12	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	12	22,500,000.00	24	22,500,000.00	50.00	67.98
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	60	1,204,899,500.00	12	308,713,500.00	12	167,986,000.00	12	165,711,300.00	12	98.65	12	159,074,000.00	36	633,498,800.00	60.00	52.58
1	05	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Website	Dok	5	139,578,000.00	1	37,950,000.00	1	26,160,000.00	1	22,800,000.00	1	87.16	1	41,745,000.00	3	102,495,000.00	60.00	73.43
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	4,284,212,500.00	75	441,969,000.00	75	315,925,000.00	75	303,630,000.00	75	96.11	0	-	75	745,599,000.00	83.33	17.40
1	05	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	8	570,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	21	1,976,301,000.00	0	-	8	48,800,000.00	8	48,680,000.00	8	99.75	0	-	8	48,680,000.00	38.10	2.46
1	05	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	263	1,737,911,500.00	69	441,969,000.00	41	267,125,000.00	41	254,950,000.00	41	95.44	0	-	110	696,919,000.00	41.83	40.10

1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1,241,588,900.00	100	70,395,800.00	100	184,780,000.00	100	143,620,700.00	100	77.73	100	138,520,000.00	100	352,536,500.00	100.00	28.39
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	43,135,000.00	12	7,500,000.00	12	7,500,000.00	12	7,500,000.00	12	100.00	12	8,100,000.00	36	23,100,000.00	60.00	53.55
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik dan Telepon	Bulan	60	579,115,100.00	12	62,895,800.00	12	79,200,000.00	12	73,290,700.00	12	92.54	12	96,000,000.00	36	232,186,500.00	60.00	40.09
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dekorasi Kendaraan Hias, Stand Pameran (dekorasi) dan HUT PoI PP dan Damkar	Event	19	619,338,800.00	0	-	4	98,080,000.00	3	62,830,000.00	3	100.00	3	34,420,000.00	2	97,250,000.00	10.53	15.70
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4,553,894,500.00	100	650,425,000.00	100	680,357,000.00	100	598,026,400.00	100	87.90	100	585,605,752.00	100	1,834,057,152.00	100.00	40.27
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	60	1,171,349,940.00	12	176,160,240.00	12	154,460,800.00	12	154,460,800.00	12	100.00	12	133,868,750.00	36	464,489,790.00	60.00	39.65
1	05	01	2	09	02	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	60	2,551,000,560.00	12	411,040,560.00	12	349,529,200.00	12	268,043,000.00	12	76.69	12	396,097,002.00	36	1,075,180,562.00	60.00	42.15
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	60	128,091,200.00	12	13,224,200.00	12	35,567,000.00	12	35,552,600.00	12	99.96	12	19,900,000.00	36	68,676,800.00	60.00	53.62
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	60	703,452,800.00	12	50,000,000.00	12	140,800,000.00	12	139,970,000.00		99.41	12	35,740,000.00	36	225,710,000.00	60.00	32.09

1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah	%	100	34,178,851,810.00	99. 76	5,124,160,000.00	99. 76	5,485,207,000.00	99.7 6	5,199,561,708.00	99.7 6	94.79	100	4,920,543,000.00	100	15,244,264,708.00	100.00	44.60
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran K3	%	100	31,882,801,810.00	99. 02	4,889,950,000.00	99. 02	5,341,512,000.00	99.0 2	5,069,591,708.00	99.0 2	94.91	100	4,617,243,000.00	100	14,576,784,708.00	100.00	45.72
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1. Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Hari Besar, Pejabat VIP, VVIP, Rapat Paripurna DPRD Kota Serang, Kegiatan Insidentil dan kegiatan penting di masyarakat	PAM	296	26,073,007,540.00	30	3,891,450,000.00	40	4,817,725,000.00	40	4,572,926,808.00	40	94.92	30	4,182,068,000.00	100	12,646,444,808.00	33.78	48.50
					2. Jumlah Tenaga Bantuan Polisi pamong Praja (BANPOL PP/TKL/Non PNS)		Oran g	220	18 0		18 0		180		180		180		180		540		245.45	
					3. Laporan Patroli Pengawasan dan Siaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Lapor an	60	12		12		12		12		12		36		60.00			
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	Pene rtiban	486	2,231,037,210.00	87	423,810,000.00	11 1	244,635,000.00	111	241,935,000.00	111	98.90	58	365,950,000.00	256	1,031,695,000.00	52.67	46.24
					Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Pena ngan an	96	12		12		12		12		12		36		37.50			
1	05	02	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan TRANSTIBUM dan perlindungan masyarakat	Oran g	298	377,097,050.00	73	85,635,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0 !	75	31,535,000.00	148	117,170,000.00	49.66	31.07
					Jumlah Laporan Kejadian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		Lapor an	48	12		0		0		0		0		24		50.00			

1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas linmas yang terlatih	Orang	552	1,207,490,800.00	150	314,850,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	150	314,850,000.00	27.17	26.07	
1	05	02	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah petugas Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	445	987,068,650.00	30	38,230,000.00	55	259,647,000.00	55	235,297,000.00	55	90.62	0	37,690,000.00	85	311,217,000.00	19.10	31.53	
							Jumlah pelatihan kesempatan/pelaksanaan tugas	Kali	132		24		24		24		24		16		64		48.48		
1	05	02	2	01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rakor Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dok	5	177,825,560.00	1	15,700,000.00	1	19,505,000.00	1	19,432,900.00	1	99.63	0	-	2	35,132,900.00	40.00	19.76	
1	05	02	2	01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pos Jaga/Ronda	Unit	6	640,275,000.00	0	120,275,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	120,275,000.00	0	0.00	18.78
							Jumlah Perlengkapan dan Alat Bantu Pengendalian dan Penerbitan	Unit	60		15		0		0		0		0		15		25.00		
							Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Bulan	24		12		0		0		0		0		12		50.00		
1	05	02	2	01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Unit	2	84,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-	
1	05	02	2	01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kota serta Perkada	Bulan	24	105,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-	

1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penanganan Pelanggaran K3	%	100	2,129,485,000.00	99.76	188,460,000.00	99.76	143,695,000.00	99.76	129,970,000.00	99.76	90.45	100	303,300,000.00	100.00	621,730,000.00	100.00	29.20
1	05	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Orang	180	317,760,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pengawasan kepatuhan Perda/Perkada	Laporan	60	489,290,000.00	12	62,090,000.00	12	30,000,000.00	12	28,900,000.00	12	0.96	0	-	24	90,990,000.00	40.00	18.60
1	05	02	2	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Pelanggaran Perda/Perkada	Laporan	60	1,322,435,000.00	12	126,370,000.00	12	113,695,000.00	12	101,070,000.00	12	0.89	48	303,300,000.00	72	530,740,000.00	120.00	40.13
1	05	02	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota	%	100	166,565,000.00	66.667	45,750,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	66.67	45,750,000.00	66.67	27.47
1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS Terbina	Orang	12	166,565,000.00	8	45,750,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	8	45,750,000.00	66.67	27.47
1	05	04	2			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	96.04	19,463,133,457.00	72.16	1,976,918,800.00	72.16	2,446,174,000.00	72.16	2,260,883,353.00	72.16	0.92	79.38	2,157,501,550.00	79.38	6,395,303,703.00	82.65	32.86
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	17,426,288,160.00	98.26	1,824,946,000.00	98.26	2,446,174,000.00	98.26	2,260,883,353.00	98.26	0.92	100	2,157,501,550.00	100	6,243,330,903.00	100.00	35.83
1	05	04	2	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	12	100,800,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	24	504,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-

1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	60	11,313,391,419.00	12	1,641,390,000.00	12	1,966,674,000.00	12	1,885,233,353.00	12	95.86	12	2,128,541,550.00	2	5,655,164,903.00	3.33	49.99	
						Jumlah Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (Balakar/TKL/Non PNS)	Orang	378	70	70	70	70	70	70	70	210	55.56								
1	05	04	2	01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	24	63,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-	
1	05	04	2	01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dok	2	52,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-	
							Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Buah	24	1,365,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-	
1	05	04	2	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Unit	4	2,873,713,345.00	0	-	1	479,500,000.00	0	375,650,000.00	1	78.34	0	28,960,000.00	0	404,610,000.00	0	14.80	14.08
							Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Damkar	Stel	588		0		87		87		87		0		87				
							Jumlah perlengkapan dan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran	Unit	213		0		63		63		63		12		75		35.21		
							Jumlah POS WMK	Unit	2		0		0		0		0		0		0		0.00		
1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas damkar yang terbina	Orang	323	851,883,396.00	68	183,556,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	68	183,556,000.00	21.05	21.55	
1	05	04	2	01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Dok Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kenakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Dok	3	165,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-	

1	05	04	2	01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dok	2	136,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dok	5	154,748,000.00	1	7,748,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	1.00	7,748,000.00	20.00	5.01
1	05	04	2	02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dok	3	102,248,000.00	1	7,748,000.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	1	7,748,000.00	33.33	7.58
1	05	04	2	02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dok	2	52,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	04	2	03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Dok	2	63,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	04	2	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dok	2	63,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	1972	1,819,097,297.00	420	144,224,800.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	420.00	144,224,800.00	21.30	7.93
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	Orang	1680	669,347,297.00	420	144,224,800.00	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	420	144,224,800.00	25.00	21.55
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam kebakaran yg dibentuk dan dibina	Orang	146	919,800,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-
1	05	04	2	04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit	146	229,950,000.00	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	-	0.00	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satpol PP Kota Serang yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, IKK, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun analisis indikator kinerja Satpol PP Kota Serang pada tahun 2020 yaitu :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

No	Indikator	Target SPM	Target IKK/standar nasional	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase penanganan perlindungan masyarakat	0	100%	89.06	91.12	92.11	92.36	92.61	89.06	91.12	92.1125	92.36	92.61	
2	Capaian Penegakan PERDA	0	100%	97.43	99.76	100	100	100	97.43	99.76	100	100	100	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	0	100%	98.24	99.02	100	100	100	98.24	99.02	100	100	100	
4	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	0	100%	94	98	100	100	100	94	98	100	100	100	
5	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	0	Poin/Score	66.06	67.45	68.45	69.45	70.45	66.06	67.45	68.45	69.45	70.45	
6	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	0	100%	42	42	43	47	51	42	42	43	47	51	
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0	100%	72.16	72.16	79.38	87.31	96.04	72.16	72.16	79.38	87.31	96.04	
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0	100%	94.49	98.26	100	100	100	94.49	98.26	100	100	100	
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP Kota Serang

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan arus urbanisasi di Kota Serang semakin meningkat karena Kota Serang merupakan pintu gerbang Ibukota Provinsi Banten secara otomatis akan membawa dampak terhadap munculnya masalah-masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Serang mulai dari penyakit masyarakat seperti banyaknya tempat hiburan malam, miras, dan PSK, masalah sosial lain yang dilatarbelakangi oleh ekonomi seperti banyaknya pedagang kreatif lapangan (PKL), gelandangan dan pengemis (gepeng) serta aksi sosial terkait pro kontra terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Sebagaimana tugas yang diemban oleh Satpol PP Kota Serang tersebut, maka fungsi Satpol PP Kota Serang sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub bidang kebakaran;
- b. menyelenggarakan kebijakan pemeliharaan ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub bidang kebakaran;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemeliharaan ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub bidang kebakaran;
- d. menyelenggarakan pengawasan kegiatan pemeliharaan ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub bidang kebakaran;
- e. Pelaporan.

Berdasarkan uraian dari fungsi Satpol PP Kota Serang tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Serang yang dihadapi saat ini dan harus segera diselesaikan oleh Satpol PP Kota Serang, yaitu :

1. Maraknya kegiatan/aktifitas ekonomi masyarakat dan atau badan usaha yang melanggar Perda/Perkada;
2. Adanya potensi gangguan ketertiban umum akibat kegiatan/aktifitas masyarakat, badan hukum dan pemerintah;
3. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dan badan hukum dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta pencegahan bahaya kebakaran;
4. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap Perda/Perkada, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta pencegahan bahaya kebakaran;
5. Belum optimalnya Peran serta PPNS Daerah dalam Penyelesaian Penegakan Pelanggaran Perda/Perkada;
6. Terbatasnya jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar yang berstatus ASN;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Satpol PP, Damkar dan Linmas.

2.3.2 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Serang

Kondisi objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi untuk pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Serang, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Satpol PP Kota Serang menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan dan

memperhitungkan potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats).

2.1.1. Kondisi Lingkungan Internal

1. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Adanya dasar hukum yang jelas terkait Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 3) Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) Jumlah Pegawai belum ideal
- 2) Jumlah PPNS masih kurang
- 3) Sarana dan prasarana minimal dan atau standard belum memadai
- 4) Kurangnya profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas
- 5) Masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan tugas

2.1.2. Kondisi Lingkungan Eksternal

1. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Ketertiban dan ketentraman merupakan hak masyarakat;
- 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang tertib dan tentram;
- 3) Dapat membangun kerjasama dengan instansi pemerintah terkait.

2. *Threat* (Ancaman)

- 1) Arus urbanisasi di Kota Serang semakin meningkat karena Kota Serang merupakan pintu gerbang Ibukota Provinsi Banten;
- 2) Meningkatnya kegiatan yang berasal dari tuntutan masyarakat terhadap kebijakan di daerah dan nasional;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat, aparat, atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- 4) Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan;
- 5) Adanya kemungkinan ancaman keselamatan/keamanan terhadap Pejabat VVIP, VIP dan pejabat penting lainnya di Kota Serang;
- 6) Adanya kemungkinan ancaman keamanan terhadap Aset Daerah dan Fasilitas Umum;
- 7) Adanya potensi yang mengancam ketentraman dan keamanan masyarakat;
- 8) Tingkat kepadatan pemukiman di Kota Serang meningkat;
- 9) Adanya kemungkinan munculnya penyakit masyarakat akibat arus urbanisasi dan pertumbuhan Kota Serang;

- 10) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
- 11) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.

Analisi SWOT terhadap kondisi internal dan eksternal yang dihadapi Satpol PP Kota Serang dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi ini disusun berdasarkan matriks SWOT yang meringkas faktor-faktor strategis Satpol PP yang menggambarkan bagaimana kekuatan dan Kelemahan internal Satpol PP dapat dipertemukan dengan peluang dan ancaman eksternal Satpol PP untuk menghasilkan empat kelompok alternatif strategis, yaitu:

- a. SO (Strengths – Opportunities) Strategi Menggunakan kekuatan yang dimiliki Satpol PP untuk mengambil peluang yang ada
- b. ST (Strengths – Threats) Strategi Menggunakan kekuatan yang dimiliki Satpol PP untuk menghindari dan mengatasi ancaman-ancaman yang ada
- c. WO (Weaknesses – Opportunities) Strategi Berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan.
- d. WT (Weaknesses – Threats) Strategi ini pada dasarnya adalah bertahan dengan kegiatan utamanya meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman

Dari analisis kondisi eksternal dan internal tersebut dapat dirumuskan bahwa strategi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan di bidang pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Analisis SWOT

<p align="center">Internal</p> <p align="center">Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dasar hukum yang jelas terkait Satuan Polisi Pamong Praja • Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; • Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 	<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pegawai belum ideal • Jumlah PPNS masih kurang • Sarana dan prasarana minimal dan atau standard belum memadai • Kurangnya profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas • Alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan tugas sangat minim
<p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tuntutan terhadap terciptanya lingkungan yang tertib dan tentram, serta perlindungan masyarakat; • Adanya resiko kemungkinan bencana kebakaran dan non kebakaran • Tersedianya Perda/Perkada yang mengandung sanksi dan ditegakan oleh Satpol PP • Meningkatnya kegiatan yang berasal dari tuntutan masyarakat terhadap kebijakan di daerah dan nasional; • Arus urbanisasi di Kota Serang semakin meningkat karena Kota Serang merupakan pintu gerbang Ibukota Provinsi Banten. 	<p>SO – Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pelayanan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan • Meningkatkan penegakan perda/perkada yang mengandung sanksi dan ditegakan oleh Satpol PP 	<p>WO – Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan jumlah Aparat Satpol PP, Linmas, Damkar, dan PPNS yang ideal • Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal dan atau standard yang memadai bagi Pol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran • Meningkatkan kualitas SDM Penegak Perda/Perkada, Penyelenggara Ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran • Pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan Tugas sesuai standarr
<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk 	<p>ST – Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kepatuhan Masyarakat, aparatur, dan badan hukum terhadap Perda/Perkada 	<p>WT – Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SDM Satpol PP, Linmas, dan Damkar, serta PPNS yang ada

<p>mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan; • Adanya kemungkinan ancaman keselamatan/keamanan terhadap Pejabat VVIP, VIP dan pejabat penting lainnya di Kota Serang; • Adanya kemungkinan ancaman keamanan terhadap Aset Daerah dan Fasilitas Umum; • Adanya potensi yang mengancam kondusifitas ketentraman dan keamanan masyarakat; • Tingkat kepadatan pemukiman di Kota Serang meningkat; • Adanya kemungkinan munculnya penyakit masyarakat akibat arus urbanisasi dan pertumbuhan Kota Serang; • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran; • Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan OPD terkait dalam rangka Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. • Meningkatkan pencegahan dini melalui Patroli, Pengamanan, Penagawalan, sosialisasi dan atau penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penggunaan Sarana dan parasarana yang ada • Efektivitas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan
--	---	---

Dari matriks SWOT ringkasan alternative strategi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pelayanan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
- Meningkatkan penegakan perda dan Perkada
- Pemenuhan jumlah Aparat Satpol PP, Linmas, Damkar, dan PPNS yang ideal

- d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal dan atau standard yang memadai
- e. Meningkatkan kualitas SDM Penegak Perda/Perkada, Penyelenggara Ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- f. Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kelembagaan
- g. Meningkatkan kepatuhan Masyarakat, aparat, dan badan hukum terhadap Perda/Perkada
- h. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pencegahan, penanggulangan, dan penyelematan kebakaran
- i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pencegahan, penanggulangan, dan penyelematan kebakaran
- j. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan OPD terkait dalam rangka Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- k. Meningkatkan pencegahan dini melalui Patroli, Pengamanan, Penagawalan, sosialisasi dan atau penyuluhan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjabatani antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2022 program kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan awal RKPD Kota Serang Tahun 2022.

Secara sfesifik review rancangan awal RKPD Tahun 2022 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, target, Pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Serang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	85	%	8,266,848,702.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Serang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	85	%	8,266,848,702.00	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16	Dok	252,385,840.00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16	Dok	252,385,840.00	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja dan P.Renja)	2	Dok	80,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja dan P.Renja)	2	Dok	80,000,000.00	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	33,116,050.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	33,116,050.00	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	18,493,640.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	18,493,640.00	
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	5,840,670.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	5,840,670.00	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	5,840,670.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	5,840,670.00	

6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (LPPD,LKPJ, LAKIP, TAPKIN)	4	Dok	65,857,880.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (LPPD,LKPJ, LAKIP, TAPKIN)	4	Dok	65,857,880.00
		Kota Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Semesteran (Evlap Renja, SIPD, SAKIP, SPM)	4	Dok			Kota Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Semesteran (Evlap Renja, SIPD, SAKIP, SPM)	4	Dok	
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Data dan Profil OPD	2	Dok	43,236,930.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Data dan Profil OPD	2	Dok	43,236,930.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	6	Dok	4,330,333,742.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	6	Dok	4,330,333,742.00
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dok	4,230,844,242.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dok	4,230,844,242.00
9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun (CaLk)	1	Dok	10,994,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun (CaLk)	1	Dok	10,994,500.00
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan (Neraca, LPE, LO, LRA)	4	Dok	88,495,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan (Neraca, LPE, LO, LRA)	4	Dok	88,495,000.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen administrasi BMD pada PD	7	Dok	54,134,520.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen administrasi BMD pada PD	7	Dok	54,134,520.00
11)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKBU dan RKPBU	2	Dok	8,000,520.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKBU dan RKPBU	2	Dok	8,000,520.00
12)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Drf. Penghapusan, Penerimaan-pengeluaran (Stock Opname), KIB dan KIR Sipbarjas/Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5	Dok	46,134,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Drf. Penghapusan, Penerimaan-pengeluaran (Stock Opname), KIB dan KIR Sipbarjas/Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5	Dok	46,134,000.00

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian PD	100	%	469,700,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian PD	100	%	469,700,000.00	
13)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan pakaian Hari-Hari Tertentu beserta perlengkapannya	390	Stel	364,100,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan pakaian Hari-Hari Tertentu beserta perlengkapannya	390	Stel	364,100,000.00	
14)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60	Orang	105,600,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60	Orang	105,600,000.00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	100	%	555,919,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	100	%	555,919,100.00	
15)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	50	Jenis	59,221,800.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	50	Jenis	59,221,800.00	
		Kota Serang	Jumlah perkakas, alat, dan bahan kantor	43	Jenis	52,418,300.00		Kota Serang	Jumlah perkakas, alat, dan bahan kantor	43	Jenis	52,418,300.00	
16)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Serang	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17	Jenis	3,562,900.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Serang	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17	Jenis	3,562,900.00	
17)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan	52,525,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan	52,525,000.00	
18)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	64,835,100.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	64,835,100.00	
19)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-Undangan	12	Bulan	45,276,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-Undangan	12	Bulan	45,276,000.00	
20)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Bulan	11,000,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Bulan	11,000,000.00	
21)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	242,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	242,000,000.00	

22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Website	1	Dok	25,080,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Website	1	Dok	25,080,000.00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Serang	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	%	1,105,439,500.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Serang	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	%	1,105,439,500.00	
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Motor Jabatan	4	Unit	120,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Motor Jabatan	4	Unit	120,000,000.00	
24)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Mobil Patroli	2	Unit	658,767,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Mobil Patroli	2	Unit	658,767,000.00	
		Kota Serang	Jumlah Kendaraan Motor Patroli	5	Unit			Kota Serang	Jumlah Kendaraan Motor Patroli	5	Unit		
25)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kota Serang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	50	Unit	326,672,500.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kota Serang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	50	Unit	326,672,500.00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	427,811,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	427,811,000.00	
26)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	9,350,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	9,350,000.00	
27)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik dan Telpon	12	Bulan	145,233,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik dan Telpon	12	Bulan	145,233,000.00	

28)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah Dekorasi Kendaraan Hias, Stand pameran (Dekorasi) dan HUT Pol PP dan Damkar	5	Event	273,228,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah Dekorasi Kendaraan Hias, Stand pameran (Dekorasi) dan HUT Pol PP dan Damkar	5	Event	273,228,000.00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,071,125,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,071,125,000.00	
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	278,487,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	278,487,000.00	
30)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	589,270,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	589,270,000.00	
31)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	33,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	Jumlah Bulan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	33,000,000.00	
32)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Serang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	170,368,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Serang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	170,368,000.00	

II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Serang	Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah	100	%	8,167,806,100.00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Serang	Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah	100	%	8,167,806,100.00
9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Persentase Penanganan Pelanggaran K3	100	%	7,530,356,100.00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Persentase Penanganan Pelanggaran K3	100	%	7,530,356,100.00
33)	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Serang	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Hari Besar, VIP VVIP, dan Pengamanan Event/Kegiatan Penting dimasyarakat	79	PAM	5,981,947,400.00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Serang	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Hari Besar, VIP VVIP, dan Pengamanan Event/Kegiatan Penting dimasyarakat	79	PAM	5,981,947,400.00
		Kota Serang	Jumlah Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (BANPOL PP/TKL/Non PNS)	200	Orang			Kota Serang	Jumlah Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (BANPOL PP/TKL/Non PNS)	200	Orang	
		Kota Serang	Laporan Patroli Pengawasan dan Siaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12	Laporan			Kota Serang	Laporan Patroli Pengawasan dan Siaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12	Laporan	
34)	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Serang	Jumlah Penertiban atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	144	Penertiban	512,810,100.00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Serang	Jumlah Penertiban atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	144	Penertiban	512,810,100.00
		Kota Serang	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	24	Penanganan			Kota Serang	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	24	Penanganan	
35)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah aparaturnya yang mengikuti rakor penyelenggaraan TRANTIBUM dan perlindungan masyarakat	134	Orang	96,860,500.00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah aparaturnya yang mengikuti rakor penyelenggaraan TRANTIBUM dan perlindungan masyarakat	134	Orang	96,860,500.00
		Kota Serang	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan TRANTIBUM dan perlindungan masyarakat	12	Laporan			Kota Serang	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan TRANTIBUM dan perlindungan masyarakat	12	Laporan	

36)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang	Jumlah petugas linmas yang terlatih	134	Orang	296,648,000.00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang	Jumlah petugas linmas yang terlatih	134	Orang	296,648,000.00
37)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Serang	Jumlah petugas Satpol PP yang mengikuti Peningkatan Kasitas SDM	200	Orang	229,036,500.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Serang	Jumlah petugas Satpol PP yang mengikuti Peningkatan Kasitas SDM	200	Orang	229,036,500.00
		Kota Serang	Jumlah pelatihan kesamaptaan/Fisik dan Mental	36	Kali			Kota Serang	Jumlah pelatihan kesamaptaan/Fisik dan Mental	36	Kali	
38)	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Dok	53,053,600.00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Dok	53,053,600.00
39)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang	Jumlah Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Stiker, Police Line	15	Jenis/Unit	200,000,000.00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang	Jumlah Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Stiker, Police Line	15	Jenis/Unit	200,000,000.00
		Kota Serang	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Bulan			Kota Serang	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Bulan	
40)	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Dok	40,000,000.00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Dok	40,000,000.00
41)	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Serang	Jumlah layanan terhadap warga negara yang terkena dampak gangguan Trantiburn akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kota serta Perkada	12	Kali	120,000,000.00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Serang	Jumlah layanan terhadap warga negara yang terkena dampak gangguan Trantiburn akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kota serta Perkada	12	Kali	120,000,000.00

10	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Serang	Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar	100	%	597,300,000.00	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Serang	Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar	100	%	597,300,000.00	
42)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Serang	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	60	Orang	105,600,000.00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Serang	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	60	Orang	105,600,000.00	
43)	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Pengawasan/Razia kepatuhan Perda/Perkada	24	Laporan	259,700,000.00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Pengawasan/Razia kepatuhan Perda/Perkada	24	Laporan	259,700,000.00	
44)	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Serang	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota (Sidang Tipiring)	20	Laporan	232,000,000.00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Serang	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota (Sidang Tipiring)	20	Laporan	232,000,000.00	
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Serang	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota	100	%	40,150,000.00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Serang	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota	100	%	40,150,000.00	
45)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Serang	Jumlah PPNS Terbina	14	Orang	40,150,000.00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Serang	Jumlah PPNS Terbina	14	Orang	40,150,000.00	
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Serang	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	87.31	%	5,606,732,522.00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Serang	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	87.31	%	5,606,732,522.00	
12	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100	%	4,784,720,514.00	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100	%	4,784,720,514.00	
46)	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140	Orang	48,000,000.00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140	Orang	48,000,000.00	

47)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	240,000,000.00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	240,000,000.00
48)	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Laporan	2,560,682,828.00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Laporan	2,560,682,828.00
		Kota Serang	Jumlah Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (TKL/Non PNS)	80	Orang			Kota Serang	Jumlah Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (TKL/Non PNS)	80	Orang	
49)	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	30,000,000.00	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Laporan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	30,000,000.00
50)	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Serang	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (SOP dan SPM)	2	Dok	25,000,000.00	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Serang	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (SOP dan SPM)	2	Dok	25,000,000.00
		Kota Serang	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	12	Buan	650,000,000.00		Kota Serang	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	12	Buan	650,000,000.00
51)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	1	Unit	888,934,926.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	1	Unit	888,934,926.00
		Kota Serang	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Damkar (PDL dan PDH dan PDUB)	127	Stel			Kota Serang	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Damkar (PDL dan PDH dan PDUB)	127	Stel	
		Kota Serang	Jumlah perlengkapan dan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran (APD, Termasuk Tenda)	50	Unit			Kota Serang	Jumlah perlengkapan dan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran (APD, Termasuk Tenda)	50	Unit	
		Kota Serang	Jumlah POS WMK	1	Unit			Kota Serang	Jumlah POS WMK	1	Unit	

52)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Petugas damkar yang terbina	80	Orang	222,102,760.00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Petugas damkar yang terbina	80	Orang	222,102,760.00
53)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Serang	Jumlah Dok Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kenakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1	Dok	55,000,000.00	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Serang	Jumlah Dok Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kenakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1	Dok	55,000,000.00
54)	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Dok	65,000,000.00	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Dok	65,000,000.00
13	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	24	Dok	70,000,000.00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	24	Dok	70,000,000.00
55)	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Laporan	45,000,000.00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Laporan	45,000,000.00
56)	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Laporan	25,000,000.00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Laporan	25,000,000.00

14	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	12	Dok	30,000,000.00	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	12	Dok	30,000,000.00	
57)	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12	Laporan	30,000,000.00	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Dokumen investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12	Laporan	30,000,000.00	
15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	688	Orang	722,012,008.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	688	Orang	722,012,008.00	
58)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	420	Orang	174,512,008.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	420	Orang	174,512,008.00	
59)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Relawan Pemadam kebakaran yg dibentuk dan dibina	134	Orang	438,000,000.00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Serang	Jumlah Relawan Pemadam kebakaran yg dibentuk dan dibina	134	Orang	438,000,000.00	
60)	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kota Serang	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	134	Unit	109,500,000.00	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kota Serang	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	134	Unit	109,500,000.00	
TOTAL						22,041,387,324.00	TOTAL						22,041,387,324.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Satpol PP Kota Serang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik.

Proses penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2022 didasari kepada Renstra Satpol PP Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Reancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renwal RKPD) Tahun 2022 yang disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Musrembang Kota Serang.

Adapun usulan program dan kegiatan pada Satpol PP Kota Serang dari pemangku kepentingan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Kp. puji rt.014 rw.005, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Kp. Cigoer, Kota Serang, Walantaka, Nyapah	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
1)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Ling. Cori RT. 01/04, Kota Serang, Taktakan, Taktakan	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		4	RT 001-019 (setiap RT 1 Gardu), Kota Serang, Taktakan, Cilowong	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		5	Kp.Karang dawa Timur Rt 002 Rw 002, Kota Serang, Taktakan, Pancur	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		6	Kp.Pipitan Rt.006 Rw.002, Kota Serang, Walantaka, Pipitan	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		7	Kp.Pipitan Rt 008 Rw.002, Kota Serang, Walantaka, Pipitan	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		8	Kp.Pipitan Rt.004 Rw.002, Kota Serang, Walantaka, Pipitan	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		9	Gang Kiraja Kp.Ampian Rt.013 Rw.004, Kota Serang, Walantaka, Pipitan	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		10	Perumahan Bumi Banten Indah, Kota Serang, Taktakan, Sepang	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)

		11	Link. Cowe kigede Rt.01/02, Kota Serang, Taktakan, Sepang	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		12	lingk cipaung RT.04/03, Kota Serang, Taktakan, Kuranji	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		13	semua RT Se Kelurahan Pancur, Kota Serang, Taktakan, Pancur	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		14	Kp. Perumasan Rt. 012 Rw. 02, Kota Serang, Taktakan, Kalanganyar	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		15	Kp. Perumasan Rw. 004 RW. 02, Kota Serang, Taktakan, Kalanganyar	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		16	Komplek perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Walantaka, Kalodran	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		17	Kp. Perumasan Rt. 004 Rw. 02, Kota Serang, Taktakan, Kalanganyar	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		18	kp. Perumasan Rt. 005 Rw. 07, Kota Serang, Taktakan, Kalanganyar	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		19	Rw. 01, Rw 03, Rw. 04, Rw. 05, Kota Serang, Taktakan, Umbul Tengah	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		20	Lingk. Keradenan RT 010/003, Kota Serang, Kasemen, Kasunyatan	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		21	kp. suci Rt.001/01, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		22	kp. sampang2 Rt.003/01, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		23	seluruh RT d lingk. Mesjid Priyayi, Kota Serang, Kasemen, Mesjid Priyayi	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		24	kp. terumbu rt.007/02, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		25	Kp.Ranca Yomas RT.002 RW.005, Kota Serang, Curug, Curug	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		26	kp. peranan rt.010/03, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)

		27	kp. kademangan rt.011/04, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		28	kp. karang kayen rt.013/04, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		29	kp. puji rt.014/05, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		30	kp. puji rt.015/05, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		31	kp. suci.017/01, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		32	kp. peranan rt.018/03, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		33	kp. sudi mampir rt/019/03, Kota Serang, Kasemen, Terumbu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		34	lingkungan karundang kolektor rw.02, Kota Serang, Cipocok Jaya, Tembong	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		35	Ambon Rt 025/007, Padek RT 012/002, Kp. Cikedung Rt 014/006, Kp. Padek RT 021/002, Ambon RT. 020/007,, Kota Serang, Kasemen, Margaluyu	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		36	Wilayah Kel. Banten, Kota Serang, Kasemen, Banten	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		37	Wilayah Kel. Kilasah, Kota Serang, Kasemen, Kilasah	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		38	Lingkungan Pasir Asem RW.05, Kota Serang, Cipocok Jaya, Tembong	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		39	Lingk. Cibonteng RW. 001, Kota Serang, Walantaka, Lebakwangi	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		40	Lingk. Katepeng RW.002, Kota Serang, Walantaka, Lebakwangi	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		41	Lingk. Cidangur RW.003, Kota Serang, Walantaka, Lebakwangi	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		42	Ujung Tebu, Kota Serang, Curug, Sukajaya	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		43	Kp. Kadupandak, Kota Serang, Curug, Sukajaya	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)

		44	Kp. Pujuh, Kota Serang, Curug, Sukajaya	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		45	Kp. Gowok Kepuh, Kota Serang, Curug, Sukajaya	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		46	Kp. Sukamulya, Kota Serang, Curug, Sukajaya	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		47	Kp. Cangkring, Kp. Kebon Lama, Kp. Ciranjang, Kp. Badamuss RT. 03/RW. 08,, Kota Serang, Kasemen, Sawah Luhur	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		48	RW 01,04,05,06,07,08,09 Kelurahan cibendung, Kota Serang, Taktakan, Cibendung	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		49	Kp. cicae Rt.001/003, Kota Serang, Curug, Cilaku	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		50	Jalan Raya Pandeglang KM.4 Serang RT 004/001, Kota Serang, Cipocok Jaya, Tembong	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		51	Rw. 01, Rw.04, Rw.05, Rw.06, Rw.07, Rw.08, Rw.09, Kota Serang, Taktakan, Cibendung	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		52	komplek untirta permai rw.007, Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	Pembangunan Poskamling	1 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Langsung (Aspirasi)
		53	KOMplek Perumahan Kedaton Grande RW. 06, Kota Serang, Curug, Cilaku	pembangunan Poskamling	4 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Reses (Pokir)
		54	Cipocok, Cipocok jaya, kec.cipocok jaya, Kota Serang, Cipocok Jaya, Cipocok Jaya	pembangunan Poskamling	4 Unit	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Reses (Pokir)
		55	kp.lebak wangi kel.lebak wangi kec.walantaka, Kota Serang, Walantaka, Lebakwangi	pembangunan Poskamling	4 Titik	Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat, Usulan Reses (Pokir)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2021 sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi kementerian dan lembaga. Visi pembangunan nasional 2015-2021 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional 2015-2021. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2015-2021 maka yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri terutama pada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pembangunan 2015-2021. Dari 9 agenda prioritas itu yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain adalah pada Nawacita kedelapan dan kesembilan.

Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
4. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;

5. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahayakebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);**
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).**

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Satpol PP Provinsi Banten

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai sasaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Aman dan Kondusif sedangkan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yaitu Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dan sasaran Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan demikian Tujuan daerah dengan demikian Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang telah selaras

dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Satpol PP Provinsi Banten mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Provinsi Banten mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

3.1.3 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Serang

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah secara umum ditetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan mengacu pada RPJMD yang disinkronkandengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut .

Visi

Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadikota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota **Peradaban** dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan

- rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
 6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
 7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota **Berdaya**, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota **Berbudaya**, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga

terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Aje Kendor Membangun Serang”

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **Peradaban**, yang merupakan akronim dari :

Kota Serang yang **Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan

untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*).

Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang **Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang ber**DAya** saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional.

Kota Serang yang ber**Budaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (*self-help*) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Misi

Untuk mewujudkan visi **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) **Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan,** dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui**

manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.

- 3) **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, dengan** menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.
- 4) **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menghadirkan pemerintahan** yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota Serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Apabila mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Walokota Serang Tahun 2018-2023 maka Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada misi ke 4 yaitu **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**, terdapat tujuan dan sasaran guna mencapai misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang ada faktor-faktor pendorong dan penghambatnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan yang perlu dicapai untuk mencapai visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Serang dan mengatasi isu yang dihadapi oleh Satpol PP kedepan, sementara sasaran merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana berikut :

- a. Tujuan yang ingin dicapai : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- b. Sasaran yang ingin dicapai :
 1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. Meningkatnya Pelayanan Bencana Kebakaran;
 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan adalah bagian dari Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, sebagai bagian dari pencapaian suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Pada intinya, rencana strategis 2018-2023 ini adalah merupakan penjabaran dan implementasi strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Pemerintah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang periode 2018-2023.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 terdapat beberapa capaian pelaksanaan, yaitu : Capaian indikator kinerja visi dan misi kepala daerah (dapat dilihat pada tabel 3.1) serta capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (dapat dilihat pada tabel 3.2).

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2020

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah			Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja			Target Kinerja			Kondisi Akhir RPJMD	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2018		2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah		
MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN														
1.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	Indek Pembangunan Manusia			Poin	71,68	72,10	72,16	72,52	72,81	73,09	73,92	73,09	
			1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,67	8,76	8,81	8,86	8,91	8,68	8,91
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,77	12,78	12,86	12,92	12,98	12,77	12,98
			1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,58	67,83	68,00	68,17	68,34	68,51	68,75	68,51
MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN														
2.1	Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI)			Poin	NA	57,71	61,87	63,50	66,00	70,00	70,00	70,00	
			2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah	%	68,80	67,55	70,09	72,21	74,83	77,14	83,00	77,14
2.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan	Indeks kualitas lingkungan			Poin	47,35	47,35	54,34	47,63	47,68	47,79	51,30	47,79	
			2.2.1	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan RTH	%	NA	NA	2,08	3,08	4,08	5,08	NA	5,08

	berkelanjutan	n hidu p	2.2. 2	Menurunnya risiko bencana dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	150	140	130	120	110	100	100	100
--	---------------	----------------	-----------	---	-----------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

3.1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi				%	6,59	6,20	-1,29	4-5	4,25-5,25	4,5-5,5	6,91	4,5-5,5
			3.1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3,78	3,06	1,91	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
					Indeks daya beli	Poin	78,76	79,12	78,65	79,08	79,54	79,98	83,61	79,98
					PDRB per kapita	Juta Rp	42,76	45,89	45,17	46,99	49,14	51,67	52,50	51,67
					Angka Kemiskinan	%	5,36	5,28	6,06	5,96	5,86	5,76	4,86	5,76
					Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,08	9,26	9,16	9,06	8,96	7,93	8,96
					Indeks Gini	Poin	NA	0,342	0,352	0,350	0,348	0,346	NA	0,346

MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

4.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah				Poin	56,23	59,14	65,00	70,00	75,00	78,00	80,00	78,00
			4.1.1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraa	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	72,00	77,80	77,74	78,00	79,00	81,00	81,00	81,00
					Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
					Hasil Evaluasi AKIP	Poin	52,31	54,96	61,00	65,00	71,00	75,00	BB	75,00

				n pemerintahan daerah	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kateg ori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
--	--	--	--	-----------------------------	---	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (Tahun)	SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mendapat layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	100,00%	2020	Satuan Polisi Pamong Praja
II	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pemadaman, penyelamatan dan evakuasi perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan	98,86%	2020	Satuan Polisi Pamong Praja
		Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan OPD pemadam kebakaran dan penyelamatan	100,00%	2020	Satuan Polisi Pamong Praja
		Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh perangkat daerah	100,00%	2020	Satuan Polisi Pamong Praja

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2022, antara lain meliputi :

Guna menjabarkan visi, misi, sasaran, tujuan, strategi dan kebijakan maka selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program dan indikasi kegiatan disesuaikan Permendagri No. 90 Tahun 2019, sebagai berikut :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu indikatif untuk tahun 2022 sebagai berikut :

- Jumlah Program : 3 Program

- Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 60 Sub Kegiatan
- Pagu Indikatif APBD : Rp22.041.387.324,00

c. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 dapat dilihat pada Table 3.3.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2022
Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)
			INDIKATOR SASARAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		LOKASI	TARGET CAPAIAN	DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ketertarikan dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat		Persentase penanganan perlindungan masyarakat				%		92,36				100		KASAT POL PP
		Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3				%		100				100		
			Capaian Penegakan PERDA				%		100				100		
		Meningkatnya Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani				%		100				100		

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)				Poin / Score	69,45				64,95		
			01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	%	Kota Serang	85	5.915.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Banprov	90	6.211.170.000,00	SEKRETARIS
			1.05.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dok	Kota Serang	15	178.685.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16	188.905.000,00	SEKRETARIS
			1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja dan P.Renja)	Dok	Kota Serang	2	74.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	85.000.000,00	KASUBAG KEU DAN PEP
			1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD	Dok	Kota Serang	1	28.915.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	28.915.000,00	KASUBAG KEU DAN PEP
			1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	Kota Serang	1	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	7.500.000,00	
			1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dok	Kota Serang	1	4.575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	4.575.000,00	

		1.05.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	Kota Sera ng	1	4.575.000, 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.575.000,00	
		1.05.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (LPPD, LKPJ, LAKIP, TAPKIN)	Dok	Kota Sera ng	4	48.340.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	48.340.000,0 0	KASUB AG KEU DAN PEP
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan dan Smesteran (Evlap Renja, SIPD, SAKIP, SPM)	Dok	Kota Sera ng	4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4		KASUB AG KEU DAN PEP
		1.05.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Profil OPD	Dok	Kota Sera ng	1	10.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000,0 0	KASUB AG KEU DAN PEP
		1.05.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	Dok	Kota Sera ng	6	4.396.395 .000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	4.417.972.0 00,00	SEKRE TARIS
		1.05.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Dok	Kota Sera ng	1	4.315.400. 000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.336.977.00 0,00	KASUB AG KEU DAN PEP
		1.05.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun (CaLk)	Dok	Kota Sera ng	1	9.995.000, 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	9.995.000,00	KASUB AG KEU DAN PEP
		1.05.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan (Neraca, LPE, LO, LRA)	Dok	Kota Sera ng	4	71.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	71.000.000,0 0	KASUB AG KEU DAN PEP
		1.05.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD pada PD	Dok	Kota Sera ng	7	43.615.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	43.615.000, 00	SEKRE TARIS

		1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBU dan RKPBU	Dok	Kota Serang	2	5.910.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	5.910.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Drf. Penghapusan, Penerimaan-pengeluaran (Stock Opname), KIB dan KIR Sipbarjas/Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Dok	Kota Serang	5	37.705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	37.705.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%	Kota Serang	90	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	163.973.000,00	SEKRETARIS
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan pakaian Hari-Hari Tertentu beserta perlengkapannya	Stel		90	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		123	163.973.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang		0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	-	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%	Kota Serang	100	410.955.562,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	410.955.562,00	SEKRETARIS
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	Kota Serang	50	42.091.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	42.091.750,00	KASUB AG UMPEG
				Jumlah perkakas, alat, dan bahan	Jenis	Kota Serang	43	26.964.812,00			43	26.964.812,00	KASUB AG UMPEG

				kantor									
		1.05.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	Kota Serang	17	1.892.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	1.892.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Kota Serang	12	32.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	32.940.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	Kota Serang	12	33.312.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	33.312.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-Undangan	Bulan	Kota Serang	12	59.510.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	59.510.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	Kota Serang	12	22.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	22.500.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	Kota Serang	12	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	160.000.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Website	Dok	Kota Serang	1	31.745.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	31.745.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Kota Serang	85	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Banprov		90	235.000.000,00	SEKRETARIS

		1.05.01.2 .07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Motor Jabatan	Unit	Kota Sera ng	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Banprov	0	-	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Mobil Patroli	Unit	Kota Sera ng	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Banprov	1	235.000.000, 00	KASUB AG UMPEG
				Jumlah Kendaraan Motor Patroli	Unit	Kota Sera ng	0			0		
		1.05.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	Kota Sera ng	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	-	KASUB AG UMPEG
		1.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Kota Sera ng	100	124.100.0 00,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	124.100.00 0,00	SEKRE TARIS
		1.05.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bula n	Kota Sera ng	12	8.100.000, 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	8.100.000,00	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik dan Telpon	Bula n	Kota Sera ng	12	96.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	96.000.000,0 0	KASUB AG UMPEG
		1.05.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dekorasi Kendaraan Hias, Stand pameran (Dekorasi) dan HUT Pol PP dan Damkar	Eve nt	Kota Sera ng	2	20.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	20.000.000,0 0	KASUB AG UMPEG

		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Kota Serang	100	626.649.438,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	626.649.438,00	SEKRETARIS
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	Kota Serang	12	165.056.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	165.056.850,00	KASUBAG UMPEG
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	Kota Serang	12	431.592.588,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	431.592.588,00	KASUBAG UMPEG
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	Kota Serang	12	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	20.000.000,00	KASUBAG UMPEG
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	Kota Serang	12	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	10.000.000,00	KASUBAG UMPEG

		01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah	%	Kota Serang	100	8.097.806.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	8.656.499.266,10	KABID PPU DAN TRANTI B, DAN KABID SDA DAN LINMAS
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran K3	%	Kota Serang	100	7.460.356.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	7.987.176.766,10	KABID PPU DAN TRANTI B, DAN KABID SDA DAN LINMAS
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Hari Besar, VIP VVIP, dan Pengamanan Event/Kegiatan Penting dimasyarakat	PAM	Kota Serang	79	5.981.947.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	79	6.434.847.631,10	KASI KERJASAMA
		6.000.000.000,00		Jumlah Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (BANPOL PP/TKL/Non PNS)	Orang	Kota Serang	190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200		
				Laporan Patroli Pengawasan dan Siaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Laporan	Kota Serang	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12		
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Jumlah Penertiban atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Penerbitan	Kota Serang	144	512.810.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96	538.450.605,00	KASI OPDAL

			Rasa dan Kerusakan Massa	Perkada										
				Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Pengangan	Kota Serang	24		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24			
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya yang mengikuti rakor penyelenggaraan TRANTIBUM dan perlindungan masyarakat	Orang	Kota Serang	134	96.860.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75	101.703.525,00	KASI LINMAS	
				Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan TRANTIBUM dan perlindungan masyarakat	Laporan	Kota Serang	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12			
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah petugas linmas yang terlatih	Orang	Kota Serang	134	296.648.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		134	311.480.400,00	KASI LINMAS	
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah petugas Satpol PP yang mengikuti Peningkatan Kasitas SDM	Orang	Kota Serang	200	229.036.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120	240.488.325,00	KASI BINA APARATUR	
				Jumlah pelatihan kesamaptaan/Fisik dan Mental	Kali	Kota Serang	36		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36			

		1.05.02.2 .01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dok	Kota Serang	4	53.053.60 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	55.706.280,0 0	KASI KERJASAMA ANTAR LEMBA GA
		1.05.02.2 .01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (Stiker, Police Line	Jenis/Unit	Kota Serang	15	200.000.0 00,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	210.000.000, 00	KASI BINA POTENSI MASYARAKAT
	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum			Bulan	Kota Serang	12	12					
		1.05.02.2 .01.10	Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Dok	Kota Serang	1	40.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	42.000.000,0 0	KASI KERJASAMA ANTAR LEMBA GA

		1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan terhadap warga negara yang terkena dampak gangguan Trantiburn akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kota serta Perkada	Kali	Kota Serang	12	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	52.500.000,00	Kasi PPPU
		1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar	%	Kota Serang	100	597.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	627.165.000,00	KABID PPPU DAN TRANTI B
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Orang	Kota Serang	60	105.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60	110.880.000,00	KASI PPPU
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pengawasan/Razia kepatuhan Perda/Perkada	Laporan	Kota Serang	24	259.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	272.685.000,00	KASI PPPU
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Sidang Tipiring)	Laporan	Kota Serang	20	232.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	243.600.000,00	KASI PPPU

		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota	%	Kota Serang	100	40.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	42.157.500,00	KABID PPU DAN TRANSTI B
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS Terbina	Orang	Kota Serang	10	40.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	42.157.500,00	KASI KERJASAMA ANTARLEMBAGA
		01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Kota Serang	87,31	4.999.144.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96,04	5.291.752.733,90	KABID DAMKAR
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	Kota Serang	100	4.542.132.892,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	4.811.890.125,50	KABID DAMKAR
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Kota Serang	6	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	50.400.000,00	KASI PENCEGAHAN
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Kota Serang	12	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	126.000.000,00	KASI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN

		1.05.04.2 .01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Lap oran	Kota Sera ng	12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12		KASI PEMAD AMAN DAN PENYEL AMATA N
	3.000.000 .000,00			Jumlah Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran (TKL/Non PNS)	Ora ng	Kota Sera ng	80	2.546.762. 402,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90	2.716.751.11 1,00	
		1.05.04.2 .01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lap oran	Kota Sera ng	12	30.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	31.500.000,0 0	KASI PEMAD AMAN DAN PENYEL AMATA N
		1.05.04.2 .01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (SOP dan SPM)	Dok	Kota Sera ng	1	25.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	26.250.000,0 0	KASI SARAN A DAN PRASAR ANA
				Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Bua n	Kota Sera ng	12	600.000.0 00,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	630.000.000, 00	KASI PENCE GAHAN
		1.05.04.2 .01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Unit	Kota Sera ng	1	850.000.0 00,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	892.500.000, 00	KASI SARAN A DAN PRASAR ANA

			Pelindung Diri	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Damkar (PDL dan PDH dan PDUB)	Stel	Kota Serang	167				187		
				Jumlah perlengkapan dan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran (APD, Termasuk Tenda)	Unit	Kota Serang	50				50		
				Jumlah POS WMK	Unit	Kota Serang	1				1		
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas damkar yang terbina	Orang	Kota Serang	80	202.370.490,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90	212.489.014,50	KASI PENCEGAHAN
		1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Dok Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kenakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Dok	Kota Serang	1	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	57.750.000,00	KASI SARANA DAN PRASARANA
		1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dok	Kota Serang	1	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	68.250.000,00	KASI PENCEGAHAN

		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dok	Kota Serang	2	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	73.500.000,00	KABID DAMKAR
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Kota Serang	1	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	47.250.000,00	KASI SARANA DAN PRASARANA
		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Kota Serang	1	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	26.250.000,00	KASI SARANA DAN PRASARANA
		1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Dok	Kota Serang	1	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	31.500.000,00	KABID DAMKAR
		1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Kota Serang	1	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	31.500.000,00	KASI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Kota Serang	566	357.012.008,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		566	374.862.608,40	KABID DAMKAR
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	Orang	Kota Serang	420	174.512.008,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		420	183.237.608,40	KASI PENCEGAHAN

			1.05.04.2 .04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yg dibentuk dan dibina	Orang	Kota Serang	73	109.500.0 00,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		73	114.975.000, 00	KASI PENGE GAHAN	
			1.05.04.2 .04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit	Kota Serang	73	73.000.00 0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		73	76.650.000,0 0	KASI PENGE GAHAN	
TOTAL KERANGKA PENDANAAN SATPOL PP KOTA SERANG										19.012.35 1.000,00				20.159.422. 000,00	

Tabel 3.4
Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renja PD Tahun 2022

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/Formula	Penjelasan/Keterangan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	<i>Persentase penanganan perlindungan masyarakat</i>	%	<i>Nilai Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran</i>	
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<i>Capaian Penegakan PERDA</i>	%	$\frac{\text{Realisasi Perda yang ditegakan}}{\text{Jumlah Perda}} \times 100 \%$	
	<i>Tingkat penyelesaian pelanggaran K3</i>	%	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	
Meningkatnya Pelayanan Bencana Kebakaran	<i>Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani</i>	%	$\frac{\text{Realisasi bencana kebakaran kota yang dilayani}}{\text{jumlah kebakaran}} \times 100 \%$	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Perangkat Daerah	<i>Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)</i>	Score	<i>Nilai Hasil Evaluasi LKjIP (0-100)</i>	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah</i>	%	$\frac{\text{Realisasi penanganan penegakan PERDA/PERKADA}}{\text{laporan masyarakat/ badan hukum dan identifikasi satpol PP}} \times 100 \%$	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/Formulasi	Penjelasan/Keterangan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penanganan pelanggaran K3</i>	%	$\frac{\text{Realisasi penanganan pelanggaran K3}}{\text{jumlah pelanggaran K3 yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	<i>Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Peraturan Walikota</i>	%	$\frac{\text{Realisasi penyelesaian penegakan Perda/Perkada terhadap pelanggaran perda yang ditangani oleh PPNS (Tipiring)}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan ke PPNS}} \times 100 \%$	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Capaian pembinaan PPNS perangkat daerah</i>	%	$\frac{\text{Jumlah PPNS yang terbuna}}{\text{Jumlah PPNS}} \times 100 \%$	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</i>	%	$\frac{\text{Jangkauan luas WMK}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100 \%$	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran</i>	%	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<i>Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	Dok	<i>Jumlah Dokumen</i>	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Rumus/Formulasi	Penjelasan/Keterangan
Investigasi Kejadian Kebakaran	<i>Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran</i>	Dok	<i>Jumlah Dokumen</i>	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<i>Jumlah Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	%	<i>jumlah orang</i>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor</i>	%	$\frac{\text{Realisasi nilai kepuasan pelayanan kantor}}{\text{Taraet nilai kepuasan kantor}} \times 100 \%$	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	DOK	<i>Jumlah Dokumen</i>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan PD</i>	DOK	<i>Jumlah Dokumen</i>	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi BMD pada PD</i>	DOK	<i>Jumlah Dokumen</i>	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan penunjang Administrasi Kepegawaian PD</i>	%	$\frac{\text{Realisasi ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian PD}}{\text{jumlah Ketersediaan penun jana adminstasi PD}} \times 100 \%$	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum</i>	%	$\frac{\text{Realisasi ketersediaan pelayanan administrasi umum PD}}{\text{jumlah ketersediaan pelayanan administrasi umum PD}} \times 100 \%$	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Penjelasan/Keterangan
	Indikator	Satuan	Rumus/Formulasi	
	<i>PD</i>			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	$\frac{\text{Realisasi ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100 \%$	X 100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	$\frac{\text{Realisasi ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100 \%$	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	$\frac{\text{Realisasi pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100 \%$	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program Mendesak

Dalam rangka percepatan pembangunan untuk mengatasi beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kota Serang, maka dirumuskan rencana pelaksanaan program yang bersifat mendesak di Tahun 2022, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang bertanggung jawab dalam salah satu program mendesak, antara lain sebagai berikut :

1. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dilakukan sebagai bagian dari penataan Kota Serang yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah;
2. Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) merupakan bagian perwujudan dari peraturan terhadap kegiatan dan aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Indikasi Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Mendesak
Tahun 2022

Program Mendesak	Indikasi/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
Penerapan New Normal	Pengawasan Disiplin Protokol Kesehatan	7.460.356.100	Satpol PP Kota Serang
Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)	Optimalisasi Pencegahan dan Pemeliharaan Penataan PKL		
Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) secara konsisten	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda K3	597.300.000	Satpol PP Kota Serang

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang di ukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2019-2023.

Program dan kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan itu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamog Praja Kota Serang Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Serang, APBD Propinsi Banten maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang sebagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat daerah (OPD). Adapun rencana tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Renja Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pelayanan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
2. Meningkatkan penegakan perda dan Perkada

3. Pemenuhan jumlah Aparat Satpol PP, Linmas, Damkar, dan PPNS yang ideal
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal dan atau standard yang memadai
5. Meningkatkan kualitas SDM Penegak Perda/Perkada, Penyelenggara Ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
6. Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kelembagaan
7. Meningkatkan kepatuhan Masyarakat, aparat, dan badan hukum terhadap Perda/Perkada
8. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pencegahan, pengulangan, dan penyelematan kebakaran
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pencegahan, pengulangan, dan penyelematan kebakaran
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan OPD terkait dalam rangka Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
11. Meningkatkan pencegahan dini melalui Patroli, Pengamanan, Penagewalan, sosialisasi dan atau penyuluhan

Serang, Mei 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG**



KUSNA RAMDANI, S.Sos, M.Si
NIP. 19711204 199202 1 001